KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penyidikan suap proyek aspirasi DPR: Datang ke KPK, Muhaimin dikawal 2 mantan menteri
Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penyidikan Suap Proyek Aspirasi DPR

Datang Ke KPK, Muhaimin Dikawal 2 Mantan Menteri

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar akhirnya datang ke KPK. Ia dikawal mantan Menteri Tenaga Kerja Hanief Dhakiri dan mantan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo.

TEDY KROENRM



PAKE JAKET: Ketum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) tiba di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

MUHAIMIN hendak menjalani pemeriksaan sebagai saksi perkara suap proyek aspirasi DPR di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku-Maluku Utara.

Hanief dan Eko hanya diperkenankan mendampingi Muhaimin sampai lobby gedung Merah Putih KPK. Muhaimin sendirian naik ke ruang pemeriksaan di lantai dua.

Pemeriksaan Muhaimin untuk melengkapi berkas perkara tersangka Hong Arta John Alfred (HA), Direktur Utama sekaligus Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group).

"Jadi pemeriksaannya seputar pengetahuan beliau, apakah mengetahui atau bagaimana terkait dengan adanya dugaan pemberian uang dari tersangka HA," ungkap Ali Fikri, pelaksana tugas juru bicara KPK.

Penyidik juga mengonfirmasi kepada Muhaimin soal dugaan adanya aliran duit dalam proyek ke sejumlah elite PKB. "Terkait pemberian uang kan ada Rp 7 miliar, ada sekitar Rp 1 miliar dan terus ya. Nah itu pengetahuan dari saksi sejauh mana ya terkait itu," kata Ali. Ia menolak menjelaskan lebih lanjut lantaran sudah masuk materi penyidikan.

Usai pemeriksaan, Hanief dan Eko kembali mendampingi Muhaimin. Bersama-sama keluar gedung KPK. Saat dicegat awak media, Muhaimin membantah adanya duit proyek yang mengalir ke partai. "Itu tidak benar," katanya.

Muhaimin diketahui beberapa kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Rencananya, dia menjalani pemeriksaan pada Kamis ini (30/1). Namun ia memutuskan datang sehari lebih cepat, lantaran pada Kamis ada agenda kegiatan.

Sebelumnya KPK sudah memeriksa saksi-saksi anggota dan mantan anggota DPR Fraksi PKB. Yakni Fathan, Jazilul Fawaid, dan Helmy Faishal Zaini.

Diduga pemeriksaan terkait aliran dana fee proyek aspirasi DPR di BPJN IX. Kasus ini menjerat mantan anggota DPR Musa Zainuddin. Mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi V itu mengungkapkan terpaksa berbohong di sidang untuk menyelamatkan rekan satu partai.

Namun setelah divonis 9 tahun penjara dan tak diurusi kolega-koleganya, Musa akhirnya "nyanyi". Dia mengajukan permohonan menjadi justice collaborator (JC) dan membeberkan borok-borok koleganya.

Secara gamblang, Musa bilang pernah bagi-bagi duit kepada petinggi PKB dari hasil 'mengijonkan' proyek aspirasi DPR di BPJN IX.

Mantan Ketua PKB Provinsi Lampung itu mengaku hanya menikmati Rp 1 miliar. Selebihnya, yang Rp 6 miliar diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB DPR saat itu, Jazilul Fawaid.

Penyerahan duit pada Jazilul, menurut Musa, dilakukan setelah menerima instruksi dari dua petinggi partai. Masih menurut Musa, pimpinan PKB juga meminta agar kasus ini hanya berhenti sampai Musa.

Belakangan, Musa mencium gelagat, pimpinan PKB berupaya menggagalkan permohonan JC yang diajukannya.

Kuasa hukum Musa, Fadli Nasution berharap KPK mengabulkan permohonan JC kliennya. "Fakta baru yang disampaikan MZ hendaknya menjadi petunjuk untuk menuntaskan perkara ini." ■ GPG